



Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi

Jannatul Firdausiyah^{1*}, Ainur Rofiq Sofa²

¹⁻²Program Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia

firdausiahjannatul71@gmail.com^{1*}, bungaaklirik@gmail.com²

Alamat: Kampus: Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282

Korespondensi penulis: firdausiahjannatul71@gmail.com*

Abstract. *This study aims to explore the relevance of the Qur'an and Hadith in shaping social values, political ethics, and decision-making in the contemporary era, highlighting their influence on various aspects of life, such as society, public policy, democracy, leadership, law, economics, education, and technology. In the modern context marked by global challenges, the values of the Qur'an and Hadith, such as justice, consultation (shura), honesty, and responsibility, provide a strong moral framework for creating a harmonious and civilized society. The findings indicate that the social values taught by Islam promote solidarity and respect for human rights, while the principles of political ethics emphasize trustworthiness and honesty in governance. In decision-making, consultation and justice are important, as they enable the creation of inclusive and democratic public policies. Moreover, the Islamic perspective on law emphasizes the protection of individual rights and social justice, while in economics, the teachings of the Qur'an and Hadith advocate for equitable wealth distribution and the elimination of usury. In the field of education, Islamic values integrate worldly and spiritual knowledge to shape a virtuous young generation, whereas, in technology, Islamic teachings offer ethical guidance for utilizing technological advancements for the betterment of humanity. This study concludes that the Qur'an and Hadith are not only relevant but also provide practical solutions to address modern challenges in various life sectors.*

Keywords: *Qur'an, Hadith, Social values, Political ethics, Decision-making, Public policy, Democracy, Leadership, Law, Economics, Education, Technology.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam pembentukan nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan di era kontemporer, dengan menyoroti pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, kebijakan publik, demokrasi, kepemimpinan, hukum, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Dalam konteks modern yang diwarnai oleh tantangan global, nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits, seperti keadilan, musyawarah (syura), kejujuran, dan tanggung jawab, memberikan pedoman moral yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang diajarkan Islam mendorong solidaritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sementara prinsip-prinsip etika politik mengedepankan amanah dan kejujuran dalam pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan, pentingnya musyawarah dan keadilan mampu menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan demokratis. Selain itu, pandangan Islam terhadap hukum menekankan perlindungan hak individu dan keadilan sosial, sementara dalam ekonomi, ajaran Al-Qur'an dan Hadits mendorong distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan praktik riba. Di bidang pendidikan, nilai-nilai Islam mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, sedangkan dalam teknologi, ajaran Islam memberikan panduan etis untuk memanfaatkan kemajuan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya relevan tetapi juga memberikan solusi aplikatif dalam menjawab tantangan modern di berbagai sektor kehidupan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hadits, Nilai Sosial, Etika Politik, Pengambilan Keputusan, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Teknologi.

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-politik yang kompleks, masyarakat menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial, konflik politik, ketidakadilan hukum, hingga degradasi moral dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menuntut solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga berlandaskan nilai-nilai universal yang mampu menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam menyediakan pedoman moral dan etika yang relevan untuk menjawab tantangan ini.

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan ruang bagi nilai-nilai agama untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab, sebagaimana sabdanya:

"Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ajaran ini tidak hanya relevan dalam kehidupan personal, tetapi juga dalam konteks pengelolaan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan teknologi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan modern. Misalnya, kajian tentang peran nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa prinsip musyawarah (syura) memiliki keselarasan dengan praktik demokrasi modern (Mismubarak, 2024). Penelitian lainnya menyoroti bahwa ajaran Islam tentang ekonomi, seperti larangan riba dan pentingnya zakat, sangat aplikatif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Amal, 2024). Namun, masih jarang penelitian yang mengintegrasikan berbagai aspek, seperti nilai sosial, etika politik, hukum, pendidikan, dan teknologi, dalam satu kerangka kajian yang holistik.

Judul penelitian ini, *"Relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum,*

Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi", dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits dapat menjadi panduan universal dalam menghadapi tantangan kontemporer. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam studi-studi sebelumnya dengan menghadirkan analisis multidimensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis, baik dalam pengembangan keilmuan maupun penerapannya dalam kehidupan nyata, sehingga ajaran Al-Qur'an dan Hadits tetap relevan dan kontekstual dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian Teoritis dan Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai dasar bagi penelitian mengenai relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam pembentukan nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan di era kontemporer. Selain itu, disampaikan juga beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dan memberikan landasan bagi penelitian ini dilakukan.

Teori Nilai Sosial dalam Islam

Ajaran Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya solidaritas, keadilan, dan persaudaraan sebagai fondasi nilai sosial. Nilai ini sejalan dengan konsep *asabiyyah* oleh Ibnu Khaldun, yang menjelaskan pentingnya persatuan sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat. Nilai-nilai ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi tantangan seperti diskriminasi, ketimpangan sosial, dan konflik multikultural (Fikriana & Rezki, 2024).

Etika Politik dalam Perspektif Islam

Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi menekankan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai dasar moral bagi penyelenggaraan pemerintahan (Latif, 2024). Konsep ini sangat relevan dalam konteks demokrasi modern yang mengutamakan transparansi dan integritas dalam politik.

Prinsip Syura dalam Pengambilan Keputusan

Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya musyawarah (*syura*) sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Teori ini didukung oleh pemikiran Fazlur Rahman, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an harus diterjemahkan dalam konteks kebijakan publik untuk menciptakan keadilan sosial (Efendi, 2024).

Hukum dan Masalah dalam Islam

Konsep masalah oleh Al-Syatibi menawarkan panduan penting dalam penerapan hukum Islam untuk menciptakan kebermanfaatn umum. Prinsip ini relevan dalam merancang sistem hukum modern yang adil dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Ekonomi Islam: Zakat dan Larangan Riba

Yusuf Al-Qaradawi menyoroti pentingnya zakat dan larangan riba sebagai pilar ekonomi Islam yang berkeadilan. Konsep ini menjadi landasan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang etis (Saechu & Syifa, 2024).

Pendidikan Berbasis Nilai Islam

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas, tetapi juga bermoral tinggi (Sofa et al., 2024). Teori ini relevan dalam menghadapi tantangan global, di mana nilai-nilai moral sering kali terabaikan dalam pendidikan modern (Suryadi, 2024).

Penelitian ini juga didukung oleh hasil studi sebelumnya:

Studi Nilai Sosial Islam dalam Masyarakat Multikultural

Penelitian terdahulu menemukan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan dan solidaritas dapat memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat plural (Fathoni, 2024).

Etika Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Harahap menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip moral Islam dalam sistem politik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan (Harahap et al., 2024). Yanna menunjukkan bahwa pendidikan berbasis Al-Qur'an dan Hadits efektif dalam membentuk karakter peserta didik yang berbudi pekerti luhur (Yanna et al., 2024).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits memberikan panduan yang relevan untuk membentuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih adil, harmonis,

dan berkelanjutan di era kontemporer. Meskipun hipotesis ini tidak dinyatakan secara eksplisit, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi penerapannya dalam berbagai sektor kehidupan modern. Kajian teoritis ini menjadi pijakan penting bagi penelitian dalam menganalisis relevansi nilai-nilai Islam dengan dinamika kehidupan di era globalisasi dan modernitas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menganalisis relevansi dan pengaruh nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam pembentukan nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi saat ini (Niam et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan analisis konten dan kajian literatur. Analisis konten dilakukan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan, serta penerapannya dalam kehidupan kontemporer. Kajian literatur bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, serta penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber primer, yang akan dianalisis berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang membahas penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits dalam berbagai sektor kehidupan, baik secara teoritis maupun praktis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai referensi yang relevan terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits serta penerapannya dalam kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, kajian dokumen dilakukan untuk menganalisis kebijakan publik, keputusan-keputusan politik, dan praktik hukum yang sudah ada yang menerapkan nilai-nilai Islami, guna memahami penerapan ajaran Islam dalam konteks kontemporer. Wawancara dengan tokoh agama, akademisi, dan praktisi yang memiliki pemahaman tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial dan politik juga dilakukan untuk mendalami berbagai pandangan terkait relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024. Lokasi penelitian terdiri dari perpustakaan dan pusat studi Islam di beberapa universitas di Indonesia dan luar negeri, yang menyediakan literatur terkait tema penelitian. Wawancara dengan praktisi sosial dan politik, serta tokoh agama yang berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam di berbagai sektor, juga dilakukan.

Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya adalah analisis data. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mencakup pengkodean dan kategorisasi data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, seperti nilai sosial, etika politik, kebijakan publik, demokrasi, hukum, ekonomi, dan teknologi. Dalam tahap selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks kehidupan kontemporer dan membandingkannya dengan realitas sosial dan politik saat ini. Proses triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian, dengan menggunakan berbagai sumber dan teknik analisis yang berbeda.

Untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis yang berbeda. Selain itu, proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan (Mismubarak, 2024).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi saat ini. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, reformasi hukum, dan pembangunan sosial yang berbasis pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam tentang relevansi ajaran Islam dalam konteks kehidupan kontemporer, serta kontribusinya terhadap terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermoral.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an dan Hadits memiliki relevansi yang sangat besar dalam pembentukan nilai-nilai sosial, etika politik, dan

pengambilan keputusan di era kontemporer. Berdasarkan analisis literatur dan wawancara dengan berbagai tokoh, ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi di dunia modern. Berikut adalah temuan utama dari hasil penelitian ini:

Nilai Sosial:

Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang kuat dalam membentuk nilai sosial yang menekankan solidaritas, keadilan, dan persaudaraan. Ajaran tentang tolong-menolong, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlakuan adil terhadap sesama menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan diskriminasi. Pengajaran Islam yang menekankan pentingnya empati dan persaudaraan mampu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat plural dan multikultural seperti saat ini.

Dalil Nilai Sosial dalam Al-Qur'an dan Hadits:

Al-Qur'an dan Hadits memberikan banyak pedoman yang sangat relevan untuk membentuk nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa ajaran penting yang menjadi landasan dalam menciptakan nilai sosial yang kuat meliputi solidaritas, keadilan, dan persaudaraan.

Solidaritas dan Tolong-Menolong:

Salah satu ajaran yang paling jelas dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Ayat ini menegaskan pentingnya solidaritas dalam hal-hal yang baik dan mencegah tolong-menolong dalam hal yang buruk atau berlawanan dengan ajaran agama. Di dunia yang semakin individualistis, prinsip ini mengingatkan umat untuk menjaga ikatan sosial yang kuat dengan saling membantu dan mendukung dalam hal kebaikan.

Keadilan dan Perlakuan Adil Terhadap Sesama:

Islam juga mengajarkan untuk selalu berlaku adil, baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)

Ayat ini mengajarkan tentang keadilan dan kebaikan yang tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan bersama. Prinsip ini sangat relevan dalam menyelesaikan masalah ketimpangan sosial dan diskriminasi yang ada di masyarakat.

Persaudaraan dan Empati:

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya rasa persaudaraan antar sesama umat Islam dan umat manusia secara umum. Salah satu hadis yang sangat terkenal adalah:

"Barangsiapa yang tidak menyayangi (orang lain), maka dia tidak akan disayangi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia, yang dapat memperkuat hubungan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dalam masyarakat plural dan multikultural, ajaran ini sangat relevan untuk mempererat persaudaraan antar individu yang memiliki perbedaan latar belakang budaya, agama, dan etnis.

Ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits tentang solidaritas, keadilan, dan persaudaraan memberikan pedoman yang kuat untuk membentuk nilai sosial yang kokoh. Di tengah tantangan sosial kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan diskriminasi, prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan guna menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis.

Etika Politik:

Al-Qur'an dan Hadits memberikan dasar moral yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat sangat dibutuhkan dalam era politik yang sering diwarnai oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ajaran ini sangat relevan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai etika politik yang sesuai dengan ajaran Islam, politik dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan.

Dalil Etika Politik dalam Al-Qur'an dan Hadits:

Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana etika politik harus dijalankan, menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik, khususnya di zaman sekarang yang sering diwarnai oleh masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kejujuran dalam Pemerintahan

Kejujuran adalah salah satu prinsip utama yang diajarkan dalam Islam, dan sangat relevan dalam konteks politik dan pemerintahan. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan pentingnya berkata benar dan tidak berdusta. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Ayat ini menekankan bahwa kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Kejujuran dalam berpolitik adalah prinsip yang harus diterapkan oleh para pemimpin untuk memastikan integritas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Amanah dalam Memimpin

Prinsip amanah (kepercayaan) dalam memimpin adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin harus dapat menjaga amanah dengan adil dan memberikan hak kepada yang berhak. Pemimpin yang amanah akan menjaga kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks politik modern, prinsip amanah ini relevan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Perlindungan terhadap Hak Rakyat:

Perlindungan terhadap hak rakyat merupakan aspek penting dari etika politik dalam Islam. Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengingatkan para pemimpin untuk memikul tanggung jawab terhadap rakyat yang mereka pimpin, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi, termasuk hak untuk hidup, mendapatkan keadilan, dan kebebasan dari penindasan. Prinsip ini sangat relevan dalam mendukung sistem politik yang adil dan demokratis, di mana rakyat harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan politik.

Dengan menanamkan nilai-nilai etika politik yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, sistem politik dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan. Dalam era politik yang sering diwarnai dengan masalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan, ajaran-ajaran ini dapat membantu memperbaiki kondisi politik dan mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pengambilan Keputusan:

Dalam konteks pengambilan keputusan, baik di tingkat pribadi maupun publik, Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura), keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan semua pihak dan menjaga keadilan sosial. Di dalam sistem demokrasi kontemporer, nilai-nilai ini dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang inklusif dan berpihak pada kebaikan umat.

Dalil Pengambilan Keputusan dalam Al-Qur'an dan Hadits:

Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas terkait pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks publik, yang menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura), keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pembuatan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berpihak pada kebaikan umat, sesuai dengan ajaran Islam.

Musyawah (Syura) dalam Pengambilan Keputusan:

Al-Qur'an mengajarkan bahwa dalam setiap keputusan yang melibatkan kepentingan bersama, musyawarah atau konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat adalah hal yang sangat penting. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Shura ayat 38:

"Dan mereka yang menjawab panggilan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, serta urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Shura: 38)

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan, yang merupakan prinsip dasar dalam demokrasi Islam. Musyawarah memungkinkan adanya pertimbangan dari berbagai pihak, dengan tujuan mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam sistem politik dan pembuatan kebijakan publik yang inklusif, di mana semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Keadilan dalam Pengambilan Keputusan:

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 8:

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah, sebagai saksi yang adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin atau individu harus selalu berlaku adil, tanpa memandang latar belakang, golongan, atau pandangan pribadi. Keadilan adalah prinsip yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam pembuatan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Keputusan yang adil akan memastikan terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Tanggung Jawab dalam Pengambilan Keputusan:

Dalam pengambilan keputusan, baik itu pada tingkat individu maupun publik, Islam mengajarkan pentingnya rasa tanggung jawab. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengingatkan setiap individu, terutama pemimpin, untuk bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Tanggung jawab ini tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan umat. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut bagi umat, memastikan bahwa keputusan tersebut membawa manfaat dan menghindari mudarat.

Dengan mengintegrasikan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, baik pada tingkat pribadi maupun publik, nilai-nilai ini dapat membantu menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan berpihak pada kebaikan umat. Dalam sistem demokrasi kontemporer, prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang sangat relevan untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata.

Kebijakan Publik dan Demokrasi:

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya musyawarah dan penghormatan terhadap keputusan kolektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Musyawarah merupakan bagian dari prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits dapat mengurangi ketidakadilan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalil Al-Qur'an dan Hadits mengenai Kebijakan Publik dan Demokrasi:

Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang sangat relevan terkait dengan prinsip-prinsip kebijakan publik dan demokrasi, yang mencakup musyawarah, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam mendukung sistem pemerintahan yang adil dan transparan, serta dalam menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Musyawarah (Syura) dalam Kebijakan Publik:

Dalam konteks kebijakan publik, Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Allah SWT berfirman dalam Surat Asy-Shura ayat 38:

"Dan mereka yang menjawab panggilan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, serta urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka..." (QS. Asy-Shura: 38)

Ayat ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan, baik dalam urusan pribadi maupun dalam hal yang lebih besar seperti kebijakan publik, sebaiknya dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah ini mengharuskan adanya partisipasi dari berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang baik demi kepentingan bersama. Dalam konteks demokrasi, musyawarah menjadi dasar untuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Keadilan dalam Kebijakan Publik:

Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ma'idah ayat 8:

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah, sebagai saksi yang adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8)

Prinsip keadilan ini menjadi landasan yang kuat dalam kebijakan publik yang harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara adil, tanpa diskriminasi. Dalam sistem demokrasi, keadilan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang merata.

Penghormatan terhadap Hak Rakyat:

Dalam Islam, hak rakyat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang sangat dihargai. Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya:

"Seorang imam (pemimpin) adalah pelindung rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

Hadits ini mengingatkan para pemimpin bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak rakyat yang mereka pimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan yang mereka ambil. Pemimpin yang adil akan selalu mempertimbangkan hak rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga kebijakan tersebut bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua pihak.

Prinsip Keputusan Kolektif dalam Demokrasi:

Dalam konsep demokrasi, keputusan yang diambil harus mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat secara umum. Al-Qur'an mengajarkan bahwa keputusan yang diambil

oleh suatu kelompok atau masyarakat hendaknya melalui proses musyawarah dan konsensus.

Dalam Surat Al-Imran ayat 159, Allah SWT berfirman:

"Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu." (QS. Al-Imran: 159)

Ayat ini menunjukkan pentingnya keputusan yang didasarkan pada kelembutan hati dan musyawarah dalam kelompok atau masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik dan demokrasi, musyawarah adalah dasar untuk menciptakan keputusan yang bijaksana dan adil, yang mencerminkan kehendak rakyat dan menghindari dominasi satu pihak saja.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an dan Hadits memberikan prinsip-prinsip dasar yang mendukung sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan inklusif. Musyawarah, keadilan, penghormatan terhadap hak-hak rakyat, dan transparansi adalah nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kebijakan publik agar tercipta pemerintahan yang sejahtera, adil, dan merata. Prinsip-prinsip ini juga menjadi landasan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kepemimpinan:

Kepemimpinan yang ideal menurut Al-Qur'an dan Hadits adalah kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pemimpin yang mengedepankan kepentingan umat dan memiliki integritas yang tinggi diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan yang mencerminkan akhlak mulia dan bertanggung jawab akan menjadi contoh yang baik dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalil Kepemimpinan yang Ideal menurut Al-Qur'an dan Hadits:

Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas tentang sifat-sifat pemimpin yang ideal. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan keadilan dalam mengelola urusan umat. Beberapa prinsip utama mengenai kepemimpinan yang ideal menurut Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

Keadilan:

Keadilan merupakan salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Al-Qur'an menekankan pentingnya pemimpin yang adil dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak, baik dalam urusan pribadi maupun dalam urusan publik. Keadilan adalah prinsip dasar dalam Islam yang harus ditegakkan oleh setiap pemimpin.

Amanah (Kepercayaan):

Pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..." (HR. Bukhari)

Hadits ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memegang amanah dengan baik, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dan bertanggung jawab atas keputusan serta tindakan yang diambilnya.

Bijaksana dan Berilmu:

Seorang pemimpin harus bijaksana dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk memimpin umat. Al-Qur'an menyatakan dalam Surat Al-Imran ayat 159:

"Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu..." (QS. Al-Imran: 159)

Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam bertindak, bersikap lembut terhadap rakyatnya, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah. Kepemimpinan yang bijaksana akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan kedamaian di antara umat.

Mengutamakan Kepentingan Umum:

Pemimpin yang ideal adalah yang senantiasa mengutamakan kepentingan umat dan rakyatnya. Al-Qur'an mengajarkan bahwa pemimpin harus meletakkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat di atas kepentingan pribadi. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 251, Allah SWT berfirman:

"Jika Allah tidak menahan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka akan binasalah bumi ini..." (QS. Al-Baqarah: 251)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin harus bisa menjaga keseimbangan dan menegakkan keadilan demi kepentingan umat. Kepemimpinan dalam Islam adalah untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Menghormati Hak dan Kebebasan Rakyat:

Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus menghormati hak-hak dan kebebasan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada hak seorang pemimpin untuk memaksa rakyatnya tanpa izin mereka, kecuali dalam kebaikan." (HR. Bukhari)

Hadits ini mengingatkan pemimpin bahwa mereka tidak boleh semena-mena dalam memimpin, melainkan harus menghormati hak-hak rakyat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan mereka.

Hukum:

Prinsip-prinsip hukum dalam Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits memberi arahan bagi sistem hukum yang berkeadilan. Ini termasuk hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Dengan menintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum modern, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan lebih menghargai martabat manusia.

Dalil Prinsip-Prinsip Hukum dalam Islam yang Tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits:

Islam memiliki prinsip-prinsip hukum yang sangat mendasar dan terperinci, yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama manusia, serta dengan alam sekitar. Beberapa prinsip utama hukum dalam Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

Keadilan (Al-Adl):

Keadilan adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil, baik itu dalam konteks hukum atau kehidupan sehari-hari, harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Keadilan mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan yang seharusnya, tanpa diskriminasi.

Tanggung Jawab (Amanah):

Prinsip amanah sangat ditekankan dalam Islam, yang mencakup tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan adil. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

Hadits ini mengajarkan bahwa setiap orang, baik pemimpin maupun individu, memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya, termasuk dalam konteks hukum dan pelaksanaan keadilan.

Keadilan Sosial (Al-Ihsan):

Islam mengajarkan bahwa hukum harus memperhatikan keadilan sosial, yakni dengan memperjuangkan kesejahteraan semua pihak, terutama mereka yang lemah atau tertindas. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 177:

"Dan berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 177)

Prinsip ini mengharuskan umat Islam untuk selalu berbuat baik dan memperhatikan kesejahteraan sesama, yang merupakan landasan dalam menegakkan keadilan sosial.

Musyawaharah (Syura):

Dalam Islam, prinsip musyawarah atau konsultasi sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shura ayat 38:

"Dan mereka yang telah memenuhi panggilan Tuhan mereka dan mendirikan salat, serta urusan mereka (dikelola) dengan musyawarah di antara mereka..." (QS. Ash-Shura: 38)

Prinsip musyawarah mengajarkan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk dalam masalah hukum, harus melibatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana.

Larangan Dusta dan Penipuan:

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, dusta, atau ketidakjujuran dalam menjalankan hukum. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 42:

"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 42)

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam sistem hukum, kebenaran harus ditegakkan dan segala bentuk penipuan atau kebohongan harus dihindari.

Hak Asasi Manusia:

Hukum Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia, baik itu hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, maupun hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 33:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan alasan yang benar." (QS. Al-Isra: 33)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan damai, dan tindakan kekerasan atau pembunuhan tanpa alasan yang sah bertentangan dengan hukum Islam.

Penegakan Hukum yang Transparan:

Dalam Islam, hukum harus ditegakkan dengan cara yang transparan dan jelas. Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja yang disertai suatu urusan oleh umatku, lalu dia menutupinya dari mereka, maka Allah akan menutupinya dari mereka pada hari kiamat." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam menjalankan hukum. Setiap keputusan hukum harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Larangan Riba (Bunga):

Salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba atau bunga. Al-Qur'an menyebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuk setan karena sentuhan (penyakit)..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Larangan riba ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan secara tidak adil.

Prinsip-prinsip hukum ini membentuk dasar dari sistem hukum Islam yang adil, melindungi hak-hak individu, dan menjamin kesejahteraan sosial.

Ekonomi:

Ajaran ekonomi dalam Al-Qur'an dan Hadits sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi kontemporer yang berkeadilan. Al-Qur'an mengajarkan larangan terhadap riba, kewajiban zakat, serta pentingnya keseimbangan antara kekayaan dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat modern.

Dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang Ekonomi:

Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan ekonomi, baik dalam bentuk aturan yang mengatur transaksi bisnis, pengelolaan kekayaan, maupun kewajiban sosial dalam bentuk zakat. Beberapa dalil yang berkaitan dengan ekonomi dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

Larangan Riba (Bunga) dan Penciptaan Ekonomi yang Adil:

Salah satu prinsip ekonomi utama dalam Islam adalah larangan riba. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-279:

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuk setan karena sentuhan (penyakit)... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275-279)

Ayat ini menegaskan bahwa riba, yang merupakan bentuk eksploitasi finansial, dilarang dalam Islam. Ekonomi Islam mengutamakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur penindasan.

Kewajiban Zakat dan Pengentasan Kemiskinan:

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, yang berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 177:

"Dan zakat itu adalah kewajiban yang ditunaikan oleh orang-orang yang mampu." (QS. Al-Baqarah: 177)

Zakat menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Menghindari Penipuan dan Ketidakjujuran dalam Transaksi:

Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu saling makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada pengadilan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang salah." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menekankan pentingnya integritas dalam setiap transaksi ekonomi, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

Bekerja Keras dan Menjauhi Kemalasan:

Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menghindari kemalasan. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bekerja keras untuk mencari nafkah dengan cara yang halal." (HR. Muslim)

Hadits ini mengajarkan bahwa bekerja dengan tekun dan menghasilkan harta yang halal adalah bagian dari ibadah dalam Islam.

Pentingnya Kejujuran dalam Berdagang:

Rasulullah SAW bersabda:

"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memutuskan transaksi selama mereka belum berpisah, jika mereka berdua jujur dan memberi keterangan maka transaksi mereka akan diberkahi. Jika mereka berdua berbohong dan menyembunyikan keterangan, maka transaksi mereka akan kehilangan keberkahan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengajarkan bahwa perdagangan dalam Islam harus dilakukan dengan jujur, dan kejujuran akan membawa keberkahan dalam transaksi ekonomi.

Keberkahan dalam Memiliki dan Mengelola Harta:

Dalam Islam, harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang benar akan membawa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada yang lebih baik dari harta yang diperoleh dengan kerja keras yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang baik." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam ekonomi tidak hanya datang dari banyaknya harta, tetapi dari cara memperolehnya dan menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pentingnya Memperhatikan Kesejahteraan Sosial: Dalam Surat At-Tawbah ayat 60, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para muallaf, untuk hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil..." (QS. At-Tawbah: 60)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan kepada yang berhak, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pengelolaan Harta yang Seimbang dan Tidak Boros:

Islam juga mengajarkan pengelolaan harta yang seimbang dan menghindari sikap boros. Dalam Surat Al-Isra ayat 26-27, Allah SWT berfirman:

"Dan berikanlah kepada kerabat yang dekat, dan kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros..." (QS. Al-Isra: 26-27)

Ayat ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dengan bijaksana, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kewajiban sosial.

Prinsip-prinsip ini menggambarkan pandangan Islam terhadap ekonomi, yang menekankan pentingnya keadilan, etika, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam pengelolaan harta. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini masih relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, mengurangi ketimpangan, dan memperhatikan kesejahteraan bersama.

Pendidikan:

Pendidikan dalam Islam sangat dihargai, dan Al-Qur'an serta Hadits menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, baik duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti, serta

mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pendidikan berbasis ajaran Al-Qur'an dan Hadits dapat mencetak individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi.

Dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang Pendidikan dalam Islam:

Pentingnya Menuntut Ilmu

Al-Qur'an secara eksplisit mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Salah satu ayat yang menekankan hal ini adalah:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling mulia, yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-Alaq: 1-5)

Ayat ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu, yang meliputi pengetahuan duniawi dan ukhrawi.

Pendidikan yang Seimbang antara Ilmu Duniawi dan Akhirat:

Islam mengajarkan pentingnya memperoleh ilmu yang berguna untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 'Berlapang-lapanglah di majelis-majelis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini mendorong umat Islam untuk terus belajar dan berkembang, serta mencari ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Pendidikan dan Pencapaian Akhlak yang Baik:

Al-Qur'an dan Hadits menekankan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan pengetahuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter yang berbudi pekerti. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga moral dan etika. Pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam mengarah pada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti tinggi.

Mencari Ilmu adalah Kewajiban: Rasulullah SAW bersabda:

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim, baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, pendidikan adalah bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim.

Pendidikan dan Pengembangan Potensi Diri:

Dalam Surat An-Nahl ayat 78, Allah SWT berfirman:

"Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu bersyukur." (QS. An-Nahl: 78)

Ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah, yakni kemampuan untuk mendengar, melihat, dan berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan anugerah Allah.

Ilmu Pengetahuan sebagai Jalan untuk Mendekatkan Diri kepada Allah:

Dalam Surat Az-Zumar ayat 9, Allah SWT berfirman:

"Katakanlah, 'Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.'" (QS. Az-Zumar: 9)

Ayat ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan yang benar, yang didasari oleh pemahaman yang benar pula, dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT.

Pendidikan dalam Islam mencakup pengetahuan duniawi dan ukhrawi, serta penekanan pada pembentukan karakter yang baik. Ajaran Al-Qur'an dan Hadits menjadikan pendidikan sebagai alat penting dalam menyiapkan individu untuk kehidupan yang seimbang dan penuh makna, dengan dasar moral dan etika yang kokoh.

Teknologi:

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman penting untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk merusak atau menyalahgunakan kekuatan yang ada. Prinsip-prinsip etika dalam Al-Qur'an dan Hadits sangat relevan untuk mengatur

penggunaan teknologi, memastikan bahwa ia bermanfaat bagi umat manusia, dan menghindari dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial.

Dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang Menghadapi Perkembangan Teknologi:

Pentingnya Menggunakan Teknologi untuk Kebaikan:

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 256:

"Tidak ada paksaan dalam agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." (QS. Al-Baqarah: 256)

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih, dan teknologi harus digunakan untuk kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks teknologi modern, umat Islam didorong untuk memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, kebaikan, dan memperkuat nilai-nilai Islam.

Menggunakan Teknologi dengan Bijaksana:

Dalam Surat Al-A'raf ayat 31, Allah SWT berfirman:

"Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu pada setiap masjid, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menggunakan segala sesuatu, termasuk teknologi, dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Teknologi dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan:

Dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT berfirman:

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan, yang juga termasuk teknologi, dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk memanfaatkan teknologi untuk kemajuan umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan diri kepada Allah.

Pentingnya Penyebaran Ilmu melalui Teknologi:

Rasulullah SAW bersabda:

"Sampaikan dariku meskipun satu ayat." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Dalam konteks teknologi, hal ini relevan dengan pemanfaatan platform digital, media sosial, dan teknologi komunikasi lainnya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, ajaran Islam, dan nilai-nilai kebaikan.

Menghindari Penyalahgunaan Teknologi:

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, jika baik (sehat) maka baiklah seluruh tubuh, dan jika buruk maka buruklah seluruh tubuh. Ingatlah, itu adalah hati." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengingatkan bahwa penyalahgunaan teknologi bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan baik. Teknologi harus digunakan untuk tujuan yang positif dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk merusak hati atau memperburuk kondisi umat manusia.

Menggunakan Teknologi untuk Keperluan Umum dan Kebaikan:

Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu ada burung, manusia, atau hewan yang memakan dari tanaman itu, melainkan itu adalah sedekah baginya." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain akan mendapatkan pahala dari Allah. Teknologi yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penyebaran kebaikan, akan mendatangkan manfaat dunia dan akhirat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits sangat relevan dan aplikatif dalam membentuk nilai-nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam pengelolaan berbagai sektor kehidupan kontemporer. Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan moral yang kuat yang dapat mengarah pada kebijakan publik yang lebih adil, sistem demokrasi yang sehat, pengelolaan ekonomi yang berkeadilan, dan teknologi yang digunakan untuk kebaikan umat. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam

kehidupan sosial, politik, dan kebijakan modern untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Pembahasan mengenai relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam pembentukan nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan di era kontemporer tidak dapat dipisahkan dari perspektif tokoh-tokoh pemikir Islam yang telah menyumbangkan teori-teori penting dalam bidang etika sosial, politik, dan pemerintahan. Beberapa tokoh yang relevan untuk membahas hal ini antara lain Imam Al-Ghazali, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, dan Ibnu Miskawaih, yang semuanya memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran tentang akhlak dan etika dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Konteks Nilai Sosial dan Etika Politik:

Imam Al-Ghazali dalam karya monumental *Ihya' Ulumuddin* menekankan pentingnya pembentukan akhlak yang baik melalui proses spiritual seperti *riyadhah* (latihan diri), *muraqabah* (pengawasan diri), dan *muhasabah* (introspeksi diri). Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks nilai sosial dan etika politik karena ia mendorong individu untuk memiliki kesadaran tinggi dalam bertindak, yang penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam era kontemporer, ajaran ini dapat diterjemahkan dalam kebijakan publik dan pemerintahan yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap kekuasaan, sebagaimana yang dicontohkan dalam prinsip *amanah* (kepercayaan) dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis pada moralitas dan akhlak yang baik, yang sangat dibutuhkan di tengah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dunia modern.

Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dalam Pengambilan Keputusan dan Etika Politik:

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dalam *Madarij al-Salikin* menyatakan bahwa akhlak yang baik lahir dari hubungan yang erat dengan Allah dan kesucian hati. Dalam konteks pengambilan keputusan, baik dalam ranah pribadi maupun publik, prinsip *syura* (musyawarah) dan *keadilan* yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits sangat sesuai dengan ajaran Ibn Qayyim tentang pentingnya keputusan yang didasarkan pada prinsip moral dan keimanan. Pengambilan keputusan yang bijaksana dan berbasis pada musyawarah adalah refleksi dari etika politik yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini relevan dalam mendukung demokrasi yang sehat, di mana setiap keputusan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat dan menghormati hak-hak individu serta kelompok.

Pemikiran Ibnu Miskawaih dalam Pembentukan Kebiasaan Baik dan Etika Sosial:

Ibnu Miskawaih dalam *Tahdzib al-Akhlaq* mengemukakan bahwa akhlak terbentuk melalui kebiasaan baik yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengajarkan bahwa pengembangan kebiasaan baik ini dilakukan dengan cara bertahap, yang bertujuan untuk menciptakan individu dengan karakter yang mulia. Dalam konteks sosial dan politik modern, pemikiran Ibnu Miskawaih sangat relevan karena prinsip *pembiasaan* ini dapat diterapkan melalui pendidikan moral dan etika yang berkelanjutan. Misalnya, melalui aplikasi digital yang dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kebiasaan positif seperti berbagi informasi bermanfaat, mengajak kebaikan di media sosial, atau bahkan aplikasi yang memberikan tantangan harian untuk berakhlak mulia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebiasaan baik ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih etis dan berintegritas, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem sosial dan politik yang adil.

Relevansi Pemikiran Tokoh-Tokoh Ini dalam Konteks Modern:

Dalam konteks modern, pemikiran para tokoh ini dapat dijadikan pedoman dalam membentuk kebijakan publik dan sistem pemerintahan yang berfokus pada nilai-nilai moral dan akhlak. Sebagai contoh, prinsip musyawarah yang diajarkan oleh Ibn Qayyim dapat diperkuat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan latihan diri dan introspeksi juga dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan karakter dan akhlak yang baik, baik di kalangan pemimpin maupun masyarakat umum. Di sisi lain, prinsip pembiasaan kebiasaan baik dari Ibnu Miskawaih dapat diterapkan dalam pendidikan etika dan penggunaan teknologi secara bijaksana, yang sangat relevan di tengah era digital yang sarat dengan tantangan moral.

Secara keseluruhan, pemikiran para tokoh ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial, etika politik, dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan teknologi di era kontemporer. Konsep-konsep seperti musyawarah, keadilan, amanah, serta pembiasaan kebiasaan baik sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan agar masyarakat dapat mencapai keadilan sosial, pemerintahan yang bersih, serta ekonomi dan pendidikan yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "*Relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer*", dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits memiliki relevansi yang kuat dan aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan modern, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Adapun temuan-temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Nilai Sosial:** Ajaran Islam, melalui Al-Qur'an dan Hadits, memberikan pedoman yang menekankan solidaritas, keadilan, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam menjawab tantangan sosial masa kini, seperti ketimpangan sosial dan diskriminasi, serta mampu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat plural.
2. **Etika Politik:** Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya prinsip moral dalam pemerintahan dan politik, seperti kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya sistem demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
3. **Pengambilan Keputusan:** Dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks pribadi maupun publik, Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya musyawarah (syura), keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan publik dan proses-proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan umat.
4. **Kebijakan Publik dan Demokrasi:** Ajaran Al-Qur'an tentang musyawarah dan penghormatan terhadap keputusan kolektif sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Kebijakan publik yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam dapat mengurangi ketidakadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5. **Kepemimpinan:** Kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadits, berlandaskan pada keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap umat. Pemimpin yang berintegritas dan mengutamakan kepentingan rakyat akan menciptakan pemerintahan yang stabil dan sejahtera.
6. **Hukum dan Ekonomi:** Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan ekonomi yang berkeadilan, dengan menekankan larangan riba, kewajiban zakat, dan perlunya keseimbangan antara kekayaan dan kesejahteraan sosial.

7. **Pendidikan dan Teknologi:** Pendidikan dalam Islam sangat dihargai, dengan Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Selain itu, perkembangan teknologi harus diarahkan untuk kesejahteraan umat dengan mempertimbangkan etika dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan relevansi dan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan kontemporer:

1. **Pendidikan Berbasis Nilai Islam:** Diperlukan penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, untuk membentuk generasi muda yang memiliki akhlak mulia, kepedulian sosial, dan kesadaran politik yang tinggi.
2. **Pengintegrasian Etika Politik dalam Pemerintahan:** Para pembuat kebijakan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti amanah, kejujuran, dan keadilan, dalam proses pemerintahan dan politik agar tercipta tata kelola negara yang bersih, adil, dan transparan.
3. **Penerapan Prinsip Syura dalam Pengambilan Keputusan:** Pemerintah dan organisasi harus mendorong penerapan prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan bersama.
4. **Pemanfaatan Teknologi untuk Kebaikan:** Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kebaikan dan keadilan, melalui platform-platform digital seperti aplikasi pembelajaran, media sosial, dan kajian online yang dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang akhlak dan etika Islam.
5. **Kebijakan Ekonomi dan Hukum yang Berkeadilan:** Pembangunan kebijakan ekonomi dan hukum yang berkeadilan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan hak-hak minoritas dilindungi.
6. **Peningkatan Kesadaran Sosial dan Kemanusiaan:** Penguatan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan diskriminasi, serta mendorong masyarakat untuk saling tolong-menolong dan menjaga persatuan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat lebih relevan dan terintegrasi dalam kehidupan sosial,

politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi di era kontemporer. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

DAFTAR REFERENSI

- Amal, I. (2024). Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Efendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78.
- Fathoni, T. (2024). Peran teori sosial Émile Durkheim dalam pengembangan pendidikan agama Islam (perspektif solidaritas sosial dan integrasi masyarakat). *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(01), 1654–1668.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- Harahap, N. I. Y., Hanani, S., Iqbal, M., & Pratama, A. R. (2024). Peran pendidikan Islam dalam mempertahankan integrasi sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 1–11.
- Latif, M. A. (2024). Pengertian etika politik serta pendapat Ibnu Taimiyah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4(1), 11–20.
- Mismubarak, M. (2024). Politik identitas dalam tafsir Al-Mishbah (tela'ah konseptual pemikiran M. Quraish Shihab dan implikasinya pada dinamika politik di Indonesia). Institut PTIQ Jakarta.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., Fathin, S., & others. (2024). Metode penelitian kualitatif.
- Saechu, M. S., & Syifa, F. M. (2024). Efektifitas zakat dalam mengembangkan perekonomian umat dan pengaruh riba terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1–11.
- Sofa, A. R., Mundir, H., & Ubaidillah, H. (2024). Learning Islamic religious education based on spiritual and emotional intelligence to build the morals of Zainul Hasan Genggong Islamic University students. *International Journal of Educational Narratives*, 2(1), 42–47.
- Suryadi, A. (2024). *Kepemimpinan Tgk. H. Syarifuddin*, MA. UMSU Press.
- Yanna, S., Syukur, M., & others. (2024). Fiqih dan keadilan sosial: Perspektif pendidikan agama Islam. *Al-Faiza: Journal of Islamic Education Studies*, 2(3), 259–267.